

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PULAU JAWA

Tri Rizki Handayani Suganda<sup>1\*</sup>, Renea Shinta Aminda<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>tr.handayani@upnvj.ac.id , renea.shinta.rsa@gmail.com<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

\* Penulis Korespondensi

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang ditujukan untuk mengkaji pengaruh jumlah penduduk, pendapatan per kapita, inflasi dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak pada seluruh provinsi di Pulau Jawa. Penggunaan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh pada enam provinsi dalam kurun waktu tahun 2015-2020, dengan demikian total sampel yang digunakan berjumlah 36 data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pendapatan Daerah. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan program Eviews 10. Dimana hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan inflasi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan jumlah kendaraan bermotor tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

**Kata Kunci:** Penerimaan Pajak; Jumlah Penduduk; Pendapatan Per Kapita; Inflasi; Jumlah Kendaraan Bermotor.

### Abstract

*This study is a quantitative study aimed at assessing the effect of population, per capita income, inflation and the number of motorized vehicles on tax revenues in all provinces in Java. The sample used in this study used a saturated sampling technique in six provinces in the 2015-2020 period, thus the total sample used was 36 data sourced from the Central Statistics Agency and the Regional Revenue Agency. Testing the hypothesis in this study using panel data analysis with the Eviews 10 program. Where the results of the study show that population, per capita income and inflation have an influence on tax revenue, while the number of motorized vehicles has no effect on tax revenue.*

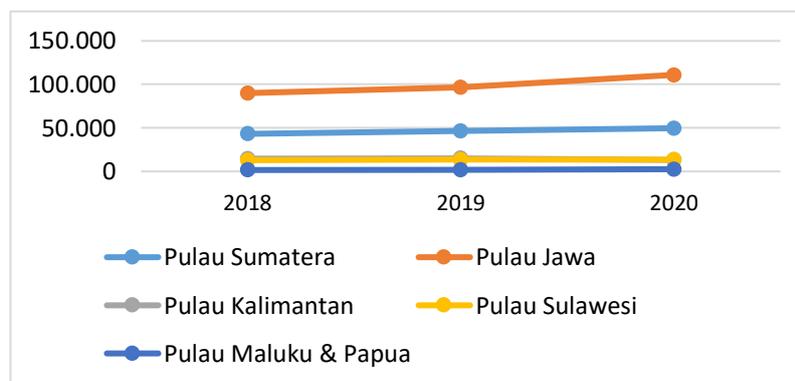
**Keywords:** Tax Revenue; Population; Per Capita Income; Inflation; number of motorized vehicles.

## 1. PENDAHULUAN

Sumber keuangan merupakan salah satu faktor utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan dapat membuat suatu daerah agar dapat meningkatkan sumber pendapatannya untuk memenuhi suatu pembiayaan yang juga dituntut dapat mengedepankan kemandirian daerah. Besarnya biaya pembangunan yang dibutuhkan membuat pemerintah daerah dituntut agar mampu dalam menggali potensi pendapatan daerah yang didapat dari penerimaan pajak. Besarnya penerimaan pajak sebagai referensi pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Penerimaan pajak pada enam provinsi di pulau Jawa memberikan peran besar terhadap perekonomian dengan spesialisasi fungsi aktivitas sosial ekonomi.

Menurut Teori Musgrave (1993) besarnya penerimaan pajak dapat ditentukan dari yang meningkat maka mempunyai pengaruh pada jumlah wajib pajak. Pendapatan per kapita digambarkan melalui peningkatan pada seluruh sektor konsumsi yang juga memberikan indikasi bahwa kesanggupan penduduk selaku wajib pajak dalam membayar pajak. Adanya lonjakan harga barang dan jasa yang berkelanjutan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena pendapatan yang diterima tetap, sedangkan kebutuhan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat berdampak pada penghasilan masyarakat. Besarnya jumlah penduduk yang diikuti mobilitas yang tinggi dapat mendorong pertambahan jumlah kendaraan bermotor sebagai kebutuhan masyarakat, sehingga besaran pajak yang dikenakan pada kendaraan tersebut dapat berperan dalam penerimaan pajak.

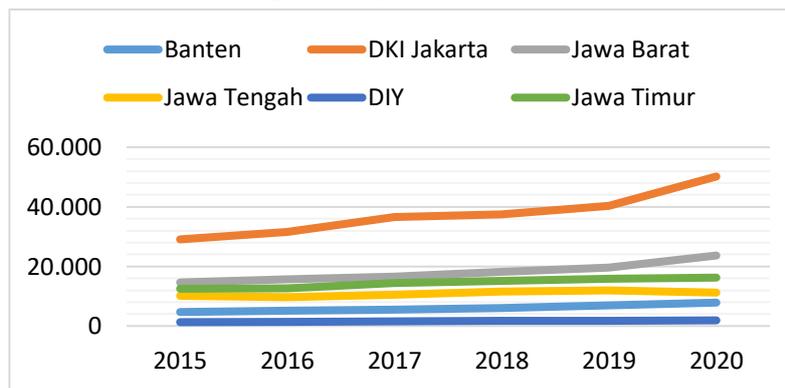
Grafik 1. Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2018-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik 2021, data diolah.

Perekonomian pulau Jawa memiliki peran penting bagi ekonomi nasional, dari segi sumber daya manusia, didukung oleh 56% total penduduk Indonesia yang menempati pulau ini dilihat sebagai pasar oleh industri Indonesia, sehingga kemudian banyak industri terkonsentrasi di pulau Jawa oleh sebab itu terdapat banyak penyetor pajak dari pulau tersebut. Pulau ini juga mengendalikan sebesar 60% kegiatan ekspor dan impor nasional, serta pertumbuhan ekonomi yang pesat sejalan dengan pertumbuhan industri (Kementerian Dalam Negeri, 2020). Terfokusnya pembangunan infrastruktur di pulau Jawa juga menjadi modal bagi pemerintah untuk pemeratakan pertumbuhan ekonomi. Sistem infrastruktur yang berfungsi dengan baik dapat mengurangi biaya distribusi dan memfasilitasi mobilitas barang dan tenaga kerja yang berimplikasi pada efektifitas biaya produksi dan peningkatan nilai ekonomi. Sementara pada empat pulau lainnya lebih mengandalkan pada sumber daya alam yang terdapat pada daerah tersebut. Keempat pulau tersebut juga memiliki infrastruktur kurang mencukupi yang dapat berpengaruh terhadap daya tarik pada investasi.

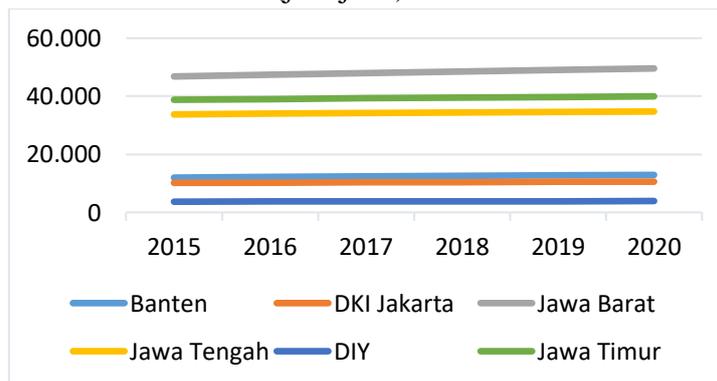
Grafik 2. Penerimaan Pajak (milyar) di Pulau Jawa Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik 2021.

Kenaikan penerimaan pajak disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk yang terserap sebagai tenaga kerja didukung oleh tersedianya perusahaan-perusahaan yang berjalan di pulau tersebut. Penerimaan pajak tertinggi dihasilkan Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata peningkatan sebanyak 37 milyar disebabkan adanya upaya optimalisasi pungutan pajak yang dilakukan pemerintah. Diikuti Provinsi Jawa Barat melalui stimulus berupa keringanan pajak menghasilkan rata-rata peningkatan sebesar 18 milyar. Pada wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten menghasilkan rata-rata peningkatan sebesar 6-10 milyar dari adanya pembebasan sanksi administrasi pungutan kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan. Penerimaan pajak terendah terjadi pada Provinsi D.I Yogyakarta dengan rerata peningkatan berkisar sekitar 1.5 milyar, jumlah ini jauh dibandingkan dengan lima provinsi lainnya. Hal ini disebabkan oleh tidak banyak perusahaan besar yang dapat menyerap tenaga kerja.

Grafik 3. Jumlah Penduduk (juta jiwa) di Pulau Jawa Tahun 2015-2020

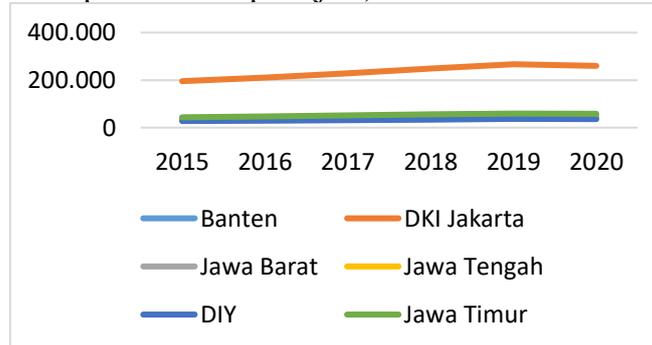


Sumber: Badan Pusat Statistik 2021.

Besarnya jumlah penduduk juga menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia pada suatu daerah. Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah penduduk tertinggi dengan rata-rata peningkatan sebesar 48 juta jiwa disebabkan oleh tingginya angka perkawinan usia dini yang mendorong tingginya angka kelahiran dan juga banyaknya pusat-pusat industri yang mendorong adanya migrasi. Hal sama terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki rata-rata peningkatan jumlah penduduk sebesar 35-40 juta jiwa disebabkan oleh kualitas lingkungan dan pendidikan yang mendorong migrasi, namun pada wilayah Jawa Tengah mengalami penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020. Pada wilayah Banten memiliki persebaran penduduk yang tidak merata. Adanya keberhasilan program keluarga berencana mampu menekan pertumbuhan penduduk pada provinsi D.I Yogyakarta, sehingga jumlah penduduk hanya mencapai sekitar 3.5 juta jiwa. Pada DKI Jakarta jumlah penduduk rendah yang hanya berkisar 10 juta jiwa dibandingkan empat provinsi lainnya disebabkan oleh

tingginya upah minimum, namun penerimaan pajak daerah terbesar dihasilkan oleh wilayah DKI Jakarta. Nyatanya hal ini berlawanan dengan teori pajak Musgrave, sebab tingginya jumlah penduduk dapat mempengaruhi besaran penerimaan pajak yang diterima oleh daerah.

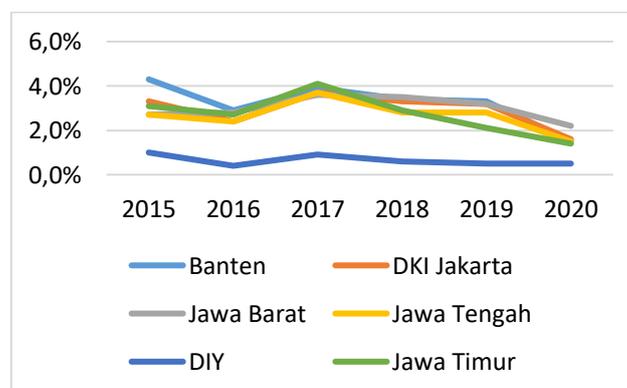
Grafik 4. Pendapatan Per Kapita (juta) di Pulau Jawa Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik 2021.

Pendapatan per kapita ini ialah indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kemakmuran wilayah. DKI Jakarta memiliki pendapatan perkapita tertinggi sebab menjadi pusat bisnis, industri jasa dan sektor keuangan terbesar di Indonesia. DKI Jakarta mampu mencatatkan pendapatan per kapita dikisaran 230 juta, namun pada 2020 pendapatan per kapitanya menurun disebabkan oleh tidak optimalnya produksi, sedangkan penerimaan pajaknya meningkat. Hal sama terjadi di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dimana memiliki pendapatan per kapita termasuk dalam kategori tinggi sebesar 38-53 juta yang dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi dan adanya peningkatan daya beli masyarakat sebagai efek dari peningkatan upah. Pada Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta memiliki pendapatan per kapita yang termasuk rendah, disebabkan oleh adanya penurunan dari sektor industri pengolahan dan perdagangan. Pada provinsi Banten memiliki pendapatan perkapita tinggi yang berada dikisaran 45 juta yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan tingginya produksi pada industri olahan serta perdagangan besar dan eceran, namun penerimaan pajak yang dihasilkan daerah tersebut termasuk rendah. Hal sama terjadi di provinsi Jawa Barat, dimana pendapatan per kapita termasuk pada kategori rendah sebesar 30 juta, namun penerimaan pajaknya tinggi. Nyatanya hal ini berlawanan dengan teori pajak Musgrave yang mana besaran pendapatan perkapita dapat mempengaruhi besaran penerimaan pajak yang diterima oleh daerah (Supriyanto, 2018).

Grafik 5. Inflasi (persen) di Pulau Jawa Tahun 2015-2020

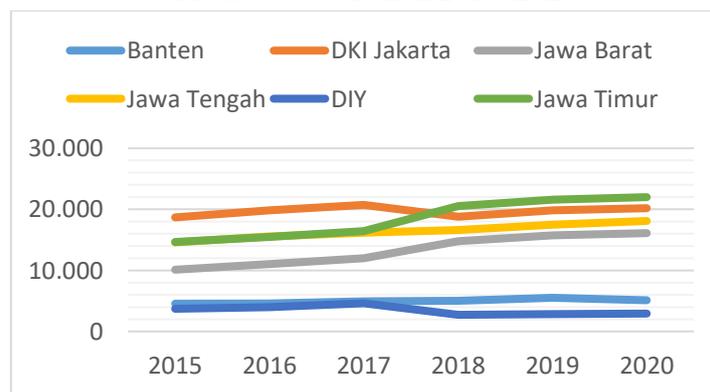


Sumber: Badan Pusat Statistik 2021.

Berdasarkan grafik di atas, rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada provinsi Banten dan Jawa barat dengan kisaran sebesar 3.2% yang mana lebih besar daripada rata-rata nasional

sebesar 3.0%. Inflasi yang tinggi tersebut disebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok khususnya beras. Selanjutnya untuk provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai tingkat inflasi rendah dibawah nasional dengan kisaran 2.6% yang dipengaruhi oleh adanya penurunan harga pada telur ayam, cabe rawit dan angkutan antarkota. Pada daerah D.I Yogyakarta memiliki rata-rata inflasi rendah sebesar 0.7%, namun penerimaan pajak juga rendah. Rendahnya inflasi dipengaruhi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah setempat dalam mempertahankan harga yang stabil (Bank Indonesia, 2020). Pada provinsi DKI Jakarta, dimana rata-rata tingkat inflasi tinggi sebesar 2.9% tingginya inflasi tersebut disebabkan peningkatan harga sejumlah bahan pangan, namun penerimaan pajaknya tinggi (Kementerian Perdagangan, 2021). Penerimaan pajak dapat menurun apabila inflasi daerah tinggi, begitupun sebaliknya (Damayanti, Suhandak, & M.G.W.E.N, 2016).

Grafik 6. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor (juta unit) di Pulau Jawa Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik 2021.

Jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan mobilitas yang tinggi mendorong peningkatan kendaraan bermotor. Rata-rata peningkatan jumlah kendaraan bermotor kategori sepeda motor dan mobil terendah selama enam tahun terakhir yaitu Provinsi D.I Yogyakarta lalu diikuti oleh Provinsi Banten yaitu hanya sebesar 3-4 juta unit disebabkan implementasi kebijakan kredit kendaraan bermotor yang dilakukan Bank Indonesia dengan menaikkan jumlah uang muka. Hal yang sama terjadi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki rata-rata peningkatan tertinggi menyentuh angka 16-18 juta unit. Hal ini juga disebabkan mudahnya pembelian kendaraan secara kredit juga mempengaruhi peningkatan kendaraan bermotor, namun penerimaan pajak tertinggi ada pada Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini bertolak belakang dengan teori, dimana tingginya jumlah kendaraan diikuti oleh jumlah penerimaan pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang melihat pengaruh jumlah penduduk, pendapatan per kapita, inflasi dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak, yaitu dengan fokus menghubungkan variabel-variabel tersebut dengan meningkatnya penerimaan pajak. Adapun penelitian tersebut antara lain yang dilakukan oleh Hartono (2019), Sitinjak (2016), Tiawan dkk (2020), Damayanti dkk (2016) dan Fauziah (2018). Berdasarkan penjelasan di atas, maka didapat rumusan masalah bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pendapatan per kapita, inflasi dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak pulau Jawa. untuk itu didapat tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk, pendapatan per kapita, inflasi dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak pulau Jawa.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### ***Teori pertumbuhan menurut Solow***

*Exogenous growth model* merupakan model yang dikemukakan Solow-Swan (1957), yaitu suatu model ekonomi yang berdasarkan pandangan *neoklasik*. Teori ini menguraikan bahwa fungsi pertumbuhan memiliki modal dan tenaga kerja sebagai input produksi  $Y = F(K, L)$ , dengan  $Y$  ialah *output perekonomian*,  $K$  (*capital*) ialah modal, dan  $L$  (*Labor*) ialah tenaga kerja (Sukirno, 2015).

### ***Teori pendapatan per kapita***

Keynes (1930) mengatakan pendapatan menjadi faktor penting sebagai penentu utama konsumsi yang mana berkaitan pada kemampuan dalam hal membayar pajak. Teori yang dikemukakan oleh Keynes disebut hipotesis pendapatan absolut yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita menggambarkan bahwa pendapatan penduduk dari berbagai sektor konsumsi selalu meningkat, yang dapat mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

### ***Teori Inflasi***

Teori Keynes menyatakan suatu keadaan dimana permintaan masyarakat terhadap barang selalu melebihi jumlah barang yang ada menyebabkan inflasi. Inflasi ini terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya dengan fokus pada bagaimana adanya perebutan antar kelompok dapat menimbulkan permintaan yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia.

### ***Hubungan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak***

Pertambahan penduduk terus mengalami peningkatan menjadikan dampak yang positif apabila diikuti dengan pertambahan jumlah usia penduduk produktif. Peningkatan jumlah penduduk produktif dapat mempengaruhi penerimaan pajak, dengan peran serta mereka sebagai tenaga kerja dan turut serta sebagai wajib pajak, sehingga dengan pajak yang mereka bayar dapat meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Teori tersebut diperkuat dengan bukti empiris yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2019), Sitinjak (2016), Tiawan dkk (2020), Fauziah (2018) dan Yeni Puspita dkk (2020) yang menguraikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

### ***Hubungan pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak***

Bertambahnya pendapatan per kapita, penerimaan pajak penghasilan dapat pula meningkat, dikarenakan objek pengenaan pajak penghasilan ialah pendapatan yang diperoleh orang pribadi maupun badan. Teori tersebut diperkuat dengan bukti empiris yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Sitinjak (2016), Huu Cung (2019) dan Supriyanto (2018) yang menyatakan pendapatan per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

### ***Hubungan inflasi terhadap penerimaan pajak***

Inflasi menyebabkan kenaikan harga-harga secara berkelanjutan, sehingga dengan tingginya harga barang dan jasa berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat dan juga penghasilan masyarakat ikut terdampak. Akibatnya, hal ini mempengaruhi penerimaan pajak, karena penghasilan masyarakat dapat berdampak pada kesanggupan ia dalam membayar pajak. Teori tersebut diperkuat dengan bukti empiris yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dkk (2016), Sitinjak (2016) dan Faisal & Rizal (2018) bahwa inflasi secara signifikan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

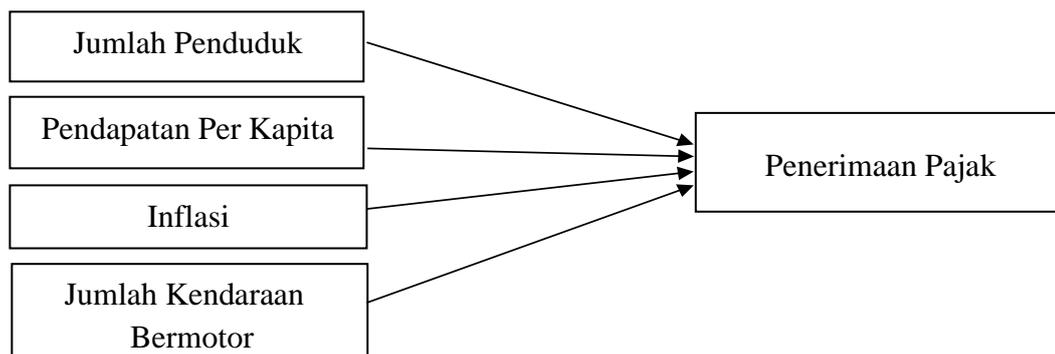
### ***Hubungan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak***

Sumber pendapatan daerah yang potensial didapat dari pungutan jumlah kendaraan bermotor. Mengingat pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi di pulau Jawa, maka hal ini juga dapat meningkatkan banyaknya pajak yang dipungut, sehingga adanya pengaruh besar dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor terhadap meningkatnya perolehan penerimaan pajak tiap tahun. Teori tersebut diperkuat dengan bukti empiris yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Tiawan dkk (2020) dan Ramlah dkk (2020) menyatakan adanya pengaruh positif dari jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak.

### ***Model penelitian***

Didasarkan pada latar belakang yang telah terurai, dibuatlah model penelitian yang mudah dan skematis dalam melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pulau Jawa. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di pulau Jawa adalah jumlah penduduk yang berdampak positif apabila penduduk dalam usia produktif lebih banyak, sehingga mereka dapat membayar pungutan wajib yang dikenakan pemerintah serta dikategorikan sebagai wajib pajak. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan negara dan dapat digunakan dalam membiayai pembangunan. Pendapatan per kapita mempunyai relasi dengan penerimaan pajak. Apabila pendapatan per kapita bertambah, dengan begitu penerimaan pajak juga ikut bertambah, sehingga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, apabila semakin melemah maka dapat menyebabkan inflasi dan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak yang dihasilkan untuk pengeluaran pemerintah. Apabila daya beli masyarakat meningkat maka dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan tersier berupa kendaraan bermotor, yang mana dapat mempengaruhi total penerimaan pajak yang diterima oleh suatu daerah.

Gambar 1. Model Pemikiran Empiris



Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Dengan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Diduga jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak pulau Jawa.
- H<sub>2</sub> : Diduga pendapatan per kapita berpengaruh terhadap penerimaan pajak pulau Jawa.
- H<sub>3</sub> : Diduga inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pulau Jawa.
- H<sub>4</sub> : Diduga jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak pulau Jawa.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***Populasi dan sampel***

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh provinsi di Pulau Jawa

dengan menggunakan data penerimaan pajak, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, inflasi dan jumlah kendaraan bermotor. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *non probability sampling*, dengan teknik *sampling* jenuh. Teknik *sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel pada penelitian ini mengambil data seluruh provinsi di Pulau Jawa terdiri dari Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur pada tahun 2015- 2020, maka jumlah sampel penelitian secara keseluruhan menjadi 36 data.

### ***Teknik pengumpulan data***

Data pada penelitian ini didapatkan melalui publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang terdiri dari data realisasi penerimaan pajak, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, inflasi dan jumlah kendaraan bermotor dalam kurun waktu 2015-2020. Penelitian data yang dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan pengumpulan data melalui suatu kajian teoritis ataupun rujukan lain terkait dengan nilai-nilai, budaya, serta norma yang ditanamkan dalam situasi sosial yang relevan sebab penelitian tidak terlepas dari literatur ilmiah.

### ***Teknik analisis data***

Model regresi yang digunakan ialah model analisis data panel yang digunakan terdiri dari penggabungan data yang dikumpulkan dalam periode waktu terhadap suatu individu (*time series*) dan yang dikumpulkan dalam periode waktu terhadap beberapa individu (*cross section*).

Adapun rumusannya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDDK_{it} + \beta_2 PKP_{it} + \beta_3 INF_{it} + \beta_4 KDRB_{it} \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y	= Penerimaan Pajak
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien pada garis regresi
PDDK	= Jumlah Penduduk
PKP	= Pendapatan Per Kapita
INF	= Inflasi
KDRB	= Jumlah Kendaraan Bermotor
i	= satuan <i>Cross Section</i>
t	= satuan <i>Time Series</i>
$\varepsilon$	= Error term

Adapun dengan estimasi model regresi data panel melalui pemilihan model pendekatan yang paling tepat melalui model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Dalam memilih estimasi data panel digunakan uji-uji chow dan hausman. Juga dengan penggunaan uji agar dapat menentukan model yang tidak bias, tepat dan konsisten (Winarno, 2015) melalui uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinieritas, dan autorkorelasi.

Pembuktian kaitan tingkat signifikansi pada koefisien regresi dari variabel bebas terhadap variabel terikat yang terdiri dari uji t-statistik dalam melihat pengaruh individu pada variabel independen terhadap variabel dependen. Uji f-statistik dalam mengetahui pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dan koefisien determinasi yaitu pengujian yang ditujukan menjelaskan seberapa besar proporsi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### *Uji asumsi klasik*

Uji asumsi klasik menggunakan hasil regresi data panel yang bertujuan untuk mengetahui keakuratan mengatasi masalah-masalah asumsi klasik melalui pembuktian dan pemenuhan atas syarat-syarat pada model regresi data panel, maka terpenuhinya tidak bias dan konsistensi.

Tabel 1. Uji Normalitas

<i>Jarque-Bera</i>	2.644781
<i>Probabilitas</i>	0.266497

*Sumber: Output Eviews 10*

Hasil uji normalitas pada model ini menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.266497 sehingga hasilnya dapat disimpulkan bahwa data pada model tersebut sudah terdistribusi normal.

Tabel 2. Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	1.401190
--------------------	----------

*Sumber: Output Eviews 10*

Berdasarkan nilai D-W diatas yaitu sebesar 1.401190, untuk membuktikan hasil uji D-W ini terbebas masalah autokorelasi maka perlu dilakukan pembuktian dalam memenuhi kriteria dimana diketahui, K terdapat 4 variabel, N terdapat 36 data, dengan  $d = 1.401190$ ,  $dl = 1.2358$ ,  $du = 1.7245$ ,  $4-dl = 2.7642$ , dan  $4-du = 2.2755$  Berdasarkan pada syarat-syarat tersebut maka diputuskan nilai  $du < d < 4-du$ , sehingga diambil kesimpulan bahwa data pada model ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas

<i>Dependent Variable: RESABS</i>	
<i>Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)</i>	
<i>Variable</i>	<i>Prob.</i>
LOGPDDK	0.0816
LOGPKP	0.0761
INF	0.1605
LOGKDRB	0.3587
C	0.0061

*Sumber: Output Eviews 10*

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan hasil masing-masing variabel, dimana PDDK sebesar 0.0816, PKP sebesar 0.0761, INF sebesar 0.1605, dan KDRB 0.3587. Berdasarkan pada hasil berikut menunjukkan bahwa nilai variabel PDDK,PKP, INF dan KDRB terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

	LOGPDDK	LOGPKP	INF	LOGKDRB
LOGPDDK	1.000000	-0.157714	0.530426	0.702832

LOGPKP	-0.157714	1.000000	0.239381	0.480080
INF	0.530426	0.239381	1.000000	0.438737
LOGKDRB	0.702832	0.480080	0.438737	1.000000

Sumber: Output Eviews 10

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan hasil korelasi antarvariabel bebas kurang dari 0.89, yang mana berarti data yang digunakan pada penelitian ini bebas dari masalah multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data			
Date: 03/13/22 Time: 09:06			
Sample: 2015 2020			
Total panel observations: 36			
Probability in ()			
Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	44.00013 (0.0000)	1.449678 (0.2286)	45.44981 (0.0000)

Sumber: Output Eviews 10

Berdasarkan uji tersebut dihasilkan nilai prob sebesar  $0.000 < 0.05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan disimpulkan bahwa model yang sesuai yaitu *random effect* model. Berdasarkan hal tersebut, menghasilkan kesimpulan model uji *Random Effect Model* sebagai model uji data panel terbaik yang dapat dilakukan.

Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel *Random Effect* Model

Dependent Variable: LOGPP				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGPDDK	0.765964	0.145489	5.264755	0.0000
LOGPKP	1.028739	0.113658	9.051141	0.0000
INF	-0.021201	0.008034	-2.638980	0.0129
LOGKDRB	-0.001257	0.098034	-0.012827	0.9898
C	-4.065296	0.726846	-5.593064	0.0000

Sumber: Output Eviews 10

Berdasarkan tabel regresi data panel di atas didapatkan persamaan regresi yang dijelaskan sebagai berikut:

$$LOGPP = -4.065296 + 0.765964LOGPDDK + 1.028739LOGPKP - 0.021201INF - 0.001257LOGKDRB$$

Berdasarkan persamaan regresi data panel tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar  $-4.065296$  berarti apabila nilai variabel bebas sebesar 0, maka nilai variabel Penerimaan Pajak (PP) sebesar  $-4.065296$ .

- b. Nilai koefisien regresi variabel Jumlah Penduduk (PDDK) sebesar 0.765964 berarti apabila nilai variabel PDDK bertambah sebesar 1 satuan, maka nilai dari penerimaan pajak meningkat sebesar 0.765964.
- c. Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Per Kapita (PKP) sebesar 1.028739 berarti apabila nilai variabel PKP bertambah sebesar 1 satuan, maka nilai dari penerimaan pajak meningkat sebesar 1.028739.
- d. Nilai koefisien regresi variabel Inflasi (INF) sebesar  $-0.021201$ . berarti apabila nilai variabel INF bertambah sebesar 1 satuan, maka nilai dari penerimaan pajak menurun sebesar 0.021201.
- e. Nilai koefisien regresi variabel Jumlah Kendaraan Bermotor (KDRB) sebesar  $-0.001257$  berarti apabila nilai variabel KDRB bertambah sebesar 1 satuan, maka nilai dari penerimaan pajak menurun sebesar 0.001257.

Tabel 7. Uji t-statistik

<i>Dependent Variable: LOGPP</i>		
<i>Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)</i>		
<i>Variable</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
LOGPDDK	5.264755	0.0000
LOGPKP	9.051141	0.0000
INF	2.638980	0.0129
LOGKDRB	-0.012827	0.9898
C	-5.593064	0.0000

*Sumber: Output Eviews 10*

Berdasarkan pada peneitian ini nilai dari  $df = n-k$ , yang dihasilkan sebesar  $df = 36-3 = 33$  dengan signifikansi 5% (0.05), maka didapatkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.03452. Sehingga uji t-statsitik dalam model ini diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk memiliki  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5.264755 > 2.03452$ ) dan probabilitas  $0.0000 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik  $H_0$  ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak dengan kata lain hipotesis pertama pada penelitian ini dapat diterima.
- b. Pendapatan per kapita memiliki  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $9.051141 > 2.03452$ ) dan probabilitas  $0.0000 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik  $H_0$  ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan per kapita mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak dengan kata lain hipotesis kedua pada penelitian ini dapat diterima.
- c. Inflasi memiliki  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $2.638980 > 2.03452$ ) dan probabilitas  $0.0129 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik  $H_0$  ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak dengan kata lain hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima.
- d. Jumlah kendaraan bermotor memiliki  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0.012827 < 2.03452$ ) dan probabilitas  $0.9898 > 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik  $H_0$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak dengan kata lain hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak.

Tabel 8. Hasil f-statistik

<i>F-statistic</i>	39.95375
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

*Sumber: Output Eviews 10*

Berdasarkan penentuan pada uji f-statistik di atas, dapat ditentukan nilai  $df_1 = 3$ ,  $df_2 = 33$  dengan signifikansi 5% (0.05). Dengan demikian diperoleh nilai pada  $F_{tabel}$  sebesar 2.89, maka uji f-statistik pada model ini diinterpretasikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $39.95375 > 2.89$ ) dengan nilai probabilitas  $0.00000 < 0.05$ . Dalam hal ini menunjukkan hipotesis pada  $H_0$  ditolak, sehingga disimpulkan bahwa jumlah penduduk, pendapatan per kapita, inflasi, dan jumlah kendaraan bermotor secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Tabel 9. Hasil Adjusted R-squared

<i>Adjusted R-squared</i>	0.813511
---------------------------	----------

*Sumber: Output Eviews 10*

Berdasarkan hasil regresi pada model penelitian ini, menunjukkan nilai dari *Adjusted R-Squared* yaitu sebesar 0.813511, yang menunjukkan hubungan antara variabel Y yaitu Penerimaan Pajak, dengan variabel X yaitu Jumlah Penduduk, Pendapatan Per Kapita, Inflasi, dan Jumlah Kendaraan Bermotor memiliki kaitan sebesar 81.35%, sedangkan sebesar 18.65% sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian.

## 5. SIMPULAN

Selama proses penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan penelitian antara lain yaitu pertama, variabel bebas yang digunakan hanya empat dengan sampel yang digunakan hanya terfokus pada enam provinsi di Pulau Jawa dengan periode penelitian selama enam tahun pengamatan yaitu 2015-2020. Kedua, erbatasnya literatur pendukung yang didapat mengenai variabel-variabel yang digunakan pada penelitian sebagai rujukan dalam menyusun penelitian ini. Ketiga, terbatasnya jurnal internasional dengan objek penelitian luar negeri yang sesuai dengan penelitian, sehingga penulis menggunakan jurnal internasional dengan objek penelitian dalam negeri dan keempat, komparasi pada masing-masing wilayah dengan uji yang berbeda belum dilakukan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi penerimaan pajak, karena banyaknya jumlah penduduk mencerminkan banyaknya wajib pajak sehingga, semakin banyak wajib pajak, semakin banyak pajak yang dibayarkan sehingga penerimaan pajak juga meningkat. Pendapatan per kapita mempengaruhi penerimaan pajak, karena pendapatan per kapita menjadi salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk yang berarti semakin banyak masyarakat yang mampu membayar retribusi pemerintah ketika pendapatan per kapita tinggi. Inflasi mempengaruhi penerimaan pajak, karena penurunan inflasi dalam jangka pendek dapat menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak, hal ini mempunyai pengaruh terhadap meningkatnya produksi barang dan jasa, sehingga semakin banyak yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat meningkat. Jumlah kendaraan bermotor tidak mempengaruhi penerimaan pajak, karena rendahnya kepatuhan masyarakat dan banyak dari masyarakat belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga pungutan pajak yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor tidak mempengaruhi penerimaan pajak.

Adapun saran dari penulis bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel independen lain yang berbeda dalam memengaruhi penerimaan pajak seperti investasi, karena dengan adanya investasi pada suatu wilayah maka dapat terjadi peningkatan pada penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat dapat mempunyai pengaruh pada produktifitas ekonomi yang dapat menambah sumber pendapatan pada suatu daerah dan diharapkan

menambah literatur-literatur pada variabel terkait yang digunakan pada penelitian sebagai bahan acuan penyusunan yang lebih baik. Sementara saran bagi Pemerintah pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk agar diimbangi dengan peningkatan pada penerimaan pajak. Diperlukannya upaya antisipasi pemerintah agar dapat memastikan pertumbuhan ekonomi dan sanggup mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Dalam rangka menarik keterterikan para pendaftar menjadi Wajib Pajak daerah diperlukan kemudahan pada sistem pendaftaran yang bisa melalui daring dan giat mensosialisasikannya baik secara langsung maupun melalui platform media sosial yang sering digunakan generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Shoesmith, E., & Sweeney, D. J. (n.d.). *Statistics for Business and Economics Statistics for Business and Economics*.
- BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). Daerah Istimewa Yogyakarta. *Portal Informasi Indonesia*. <https://indonesia.go.id/province/daerah-istimewa-yogyakarta>
- BPS Provinsi Jawa Barat. (2020). Provinsi Jawa Barat Dalam Angka. *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*. <https://jabar.bps.go.id>
- Damayanti, Oktia. Suhandak, Pamungkas, M. G. W. E. N. (2013). Pengaruh Tingkat Inflasi, Economic Growth, dan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Negara-negara Asia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Detiknews. (2019). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Barat Raup 8 Triliun. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5875163/jabar-raup-rp-8-t-dari-pajak-kendaraan-bermotor>.
- Economics, E. O. F., Economics, P. O. F., Of, E., Issues, S., Economics, M., Economics, I., Economics, A., & Economics, U. (n.d.). *The McGraw-Hill Series*.
- Fauziah, Roudotul (2018) Analisis Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pajak Pada 6 (Enam) Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 85-94.
- Gatiningsih dan Sutrisno, E. (2017). Kependudukan Dan Ketenagakerjaan. In *Modul mata kuliah*. [http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku GATI dan EKO Kependudukan LENGKAP.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku_GATI_dan_EKO_Kependudukan LENGKAP.pdf)
- Hartono, T. R. (2019). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Prosentase Penerimaan Pajak Menurut Produk Domestik Bruto. *Jurnal Ekonomi : Journal of Economic*, 10(1), 19–28.
- Huu Cung, N. (2019). Gross Domestic Product Per Capita and Individual Income Tax Revenue: Empirical Evidence from Vietnam. *International Journal of Business and Economics Research*, 8(6), 369. <https://doi.org/10.11648/j.ijber.20190806.16>
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Koridor Wilayah Jawa.
- LokaData. (2016). Jumlah kendaraan bermotor menurut provinsi dan jenis kendaraan, 2015-  
Lokadata. In *LokaData*.  
<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-provinsi-dan-jenis-kendaraan-2015-1504158661>
- Mankiw, N. G., & Weinzierl, M. (2009). *Perpajakan Optimal dalam Teori dan Praktek*. 23, 147–174.
- Margono. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT Rineka Cipta.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P.B. (1993). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Penerbit Erlangga.
- Muttaqin, F., & Halim, R. E. (2020). *The Effect of Economic Growth and Inflation on Tax Revenue: Analysis on Areas with Dominant Economic Activities in Agriculture, Plantation, and Fisheries Sectors*. 135(Aicmbs 2019), 27–33. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200410.005>
- Pajakku. (2020). Penerimaan Pajak Indonesia Masih Rendah. <https://www.pajakku.com/read/5fcee1492ef363407e21eb63/Penerimaan-Pajak-Indonesia-Masih-Rendah-Asasih-Alasannya?>
- Puspita, Y. (2020). The Role of Population, Inflation and Economic Growth of Local Tax Revenues in East Java Province, Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 5136–5146. <https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i4/pr201612>
- Putri, M. K. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di*

- Provinsi Jawa Barat. <https://jabar.bps.go.id>
- Republika. (2017). Kenaikan Harga Pada Inflasi Jawa Timur. <https://www.republika.co.id/berita/pvkfcs349/kenaikan-harga-cabai-rawit-dorong-inflasi-jatim>
- Sitinjak, N. D. (2016). Dampak Inflasi, Pertumbuhan Jumlah Pekerja, Dan Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i2.41>
- Statistics, R. F. (2015). *Statistik keuangan daerah*. 1–70.
- Sadono Sukirno. (2015). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tiawan, H., Erfit, E., & Zulgani, Z. (2020). Pengaruh jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 9(3), 119–130. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v9i3.12486>
- Ulbrich, H. H. (2013). Public Finance in theory and practice second edition. In *Public Finance in Theory and Practice Second edition*. <https://doi.org/10.4324/9780203817018>
- Utari, G. A. D., Cristina, R., & Pambudi, S. (2015). Inflasi di Indonesia : Karakteristik dan Pengendaliannya. *Bank Indonesia Institute*, 23(23), 1–64.
- Yusnika, F., & Widyaningsih, A. (2019). *Factors that Influence Tax Revenue and Government Expenditure in the Asia Pacific Region*. January. <https://doi.org/10.2991/icebef-18.2019.67>